

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam upaya untuk membangun negara Indonesia, pemerintah mengupayakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu melalui pendidikan vokasi (Slamet, 2009). Hal ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas melalui pembelajaran di sekolah (Saptono & Suparno, 2016). Pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan harus dihadapi oleh pendidikan vokasi. Berdasarkan data Forum Ekonomi Dunia, Indonesia berada di posisi 37 pada tahun 2015-2016, kemudian mengalami degradasi ke posisi 45 di tahun 2017-2018 (Suciati & Maulidiyanti, 2019). Reformasi *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) atau Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang sejalan dengan perkembangan revolusi 4.0 dan pendidikan abad XXI membutuhkan perubahan dan perkembangan teknologi, budaya, sosial dan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan sasaran yang tepat, tujuan yang jelas, kompetensi dan indikator kinerja yang jelas dan terukur (Verawadina, Jalinus, & Asnur, 2019). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya saing SDM Indonesia (B. Pracihara, 2017). Dengan harapan Revitalisasi SMK diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK (B. S. Pracihara, 2018).

Di Era Persaingan Bebas Regional Asia Tenggara yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah sepakat untuk membuka akses perekonomian pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016. “MEA merupakan komitmen untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar negara” (Anisa, 2015). “Dengan adanya MEA tugas SMK menjadi lebih besar karena persaingan yang akan dihadapi lulusan-lulusan SMK bukan lagi hanya sesama bangsa Indonesia, tetapi juga lulusan-lulusan dari negara lain” (Anisa, 2015). Pesatnya globalisasi membuat persaingan menjadi semakin ketat. Pada era MEA ini peran Sertifikasi dan Badan sertifikasi Profesi sangatlah penting (Arthur, 2016). Sekolah menengah kejuruan memiliki peran untuk mencetak lulusannya agar mampu bersaing dan

memiliki keterampilan pada suatu bidang keahlian tertentu di era persaingan yang terus berkembang (Abdillah, 2019).

Relevansi Pendidikan memiliki makna yang berarti kesesuaian yang terdapat pada dunia kerja, perkembangan Iptek dan peningkatan ekonomi (Sulfemi, 2018). Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Kredibilitas sangat dibutuhkan bagi setiap generasi sebagai faktor mendasar yang perlu diperhatikan guna meningkatkan daya saing dan produktivitas angkatan kerja di era globalisasi (Ngadi, 2014). Pada sekolah menengah kejuruan, relevansi pendidikan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang berkualitas. Terkhusus pada kompetensi yang terdapat dalam proses pembelajaran yang merupakan salah satu komponen pendidikan untuk diperhatikan demi terciptanya keselarasan pendidikan agar tidak tertinggal dengan pesatnya perkembangan yang ada serta terciptanya kemajuan pendidikan di Indonesia (Meirawan, 2012).

Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada tingkat menengah yang mengutamakan kemampuan siswa dalam melaksanakan jenis pekerjaan pada bidang tertentu, dengan tujuan agar siswa memiliki bekal dan kesiapan dalam memasuki dunia industri serta mengembangkan sikap profesional. Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan menengah kejuruan memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya
- (2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi, di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya
- (3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan
- (4) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai *Industrial Training*, dimana keberhasilannya ditandai dengan keberhasilan lulusannya (Wulansari, Neolaka, & Saleh, 2013). Sekolah Menengah Kejuruan memiliki materi khusus yang harus terdapat pada jenjang tersebut. Seperti pada materi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), materi produktif ini juga dikaji dengan melibatkan para guru, dosen yang berpengalaman, industri, para profesional dalam bidangnya serta asosiasi profesional terkait. Dengan demikian diharapkan agar kompetensi yang terdapat pada siswa SMK mengandung kemampuan dasar yang disesuaikan pada suatu bidang keahlian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Julistiana, Murtinugraha, & Bachtiar, 2017) menyatakan bahwa materi ajar mata kuliah jurusan yang dibina oleh FT UNJ sebagian besar relevan dengan materi ajar yang dipelajari di sekolah dengan hasil yang di dapat yaitu, untuk tingkat relevansi materi ajar dalam mata pelajaran C2 (Dasar Program Keahlian) terbilang tinggi. Persentase yang diperoleh untuk materi ajar pada mata pelajaran menggambar teknik sebesar 94,12%, materi ajar pada mata pelajaran mekanika teknik sebesar 88,89%, materi ajar pada mata pelajaran konstruksi bangunan sebesar 91,67% dan materi ajar pada mata pelajaran ilmu ukur tanah sebesar 100%. Sedangkan pada mata pelajaran C3 (paket keahlian) presentase yang di peroleh belum relevan, 31,25% untuk mata pelajaran menggambar konstruksi bangunan 1 dan 2, 25 % untuk materi menggambar dengan perangkat lunak, 68,75% untuk materi ajar konstruksi beton bertulang, 81,81% untuk relevansi materi ajar konstruksi batu dan 50% untuk relevansi materi ajar finishing bangunan (Julistiana et al., 2017).

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas Pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) banyak aspek pembaharuan yang berpengaruh terhadap kurikulum, salah satu perkembangan yang terjadi saat ini yaitu kurikulum berbasis KKNI. Penyusunan kurikulum berbasis KKNI perlu terus di terapkan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia, agar tujuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya serta mempunyai daya saing dan tanggung jawab dapat segera terwujud. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan bahwa KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan

dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pasal 1 ayat 1 (Kementerian Setneg RI, 2018) menyatakan bahwa Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan / atau Standar Khusus. *European Qualification Framework* (EQF) sebagai salah satu kerangka kualifikasi yang dirujuk dalam pengembangan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), membagi jenjang kualifikasi dalam sembilan tingkatan, dimulai dari kualifikasi jenjang pertama sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang sembilan sebagai kualifikasi tertinggi (A. Fatoni, 2015). Untuk jenjang pendidikan yang sesuai pada pendidikan menengah / kejuruan terdapat pada kualifikasi tenaga kerja level dua, dengan spesifikasi sebagai tenaga terampil pada jenjang pendidikan untuk pemenuhan kompetensi kerja.

Sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi untuk pemberian pengakuan kompetensi kerja, KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) seharusnya relevan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah, demi mencapai tujuan pada pendidikan vokasi yaitu agar terciptanya lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang yang ditekuninya (Siagian, 2016). Sertifikasi profesi begitu penting dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Christin Septina (2015) mengungkapkan bahwa sertifikasi profesi merupakan jati diri atau hal yang sangat penting bagi pendidikan vokasi, dalam hal ini yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Danny Mirawan (2012) mengungkapkan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya menekankan pada *Output*, tetapi juga *Outcomes* pendidikan agar profil lulusan yang dihasilkan dapat bermanfaat dan dapat menciptakan perubahan untuk menjadi lebih baik. Selain itu, untuk menunjang kolaborasi dan tercapainya tujuan pendidikan diperlukannya penyelarasan kurikulum di SMK dengan sertifikasi kompetensi pada siswa sesuai dengan KKNi untuk sekolah menengah kejuruan, pembelajaran yang di laksanakan dan di kembangkan pada SMK yang merujuk pada aspek sikap, pengetahuan dan

keterampilan yang terdapat pada Kompetensi Dasar Mata Pelajaran juga harus memiliki kesesuaian dengan kompetensi sertifikasi yang terdapat pada KKNI (Siagian, 2016). Sehingga nantinya semua perencanaan pembelajaran harus didasarkan pada capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan (A. Fatoni, 2015).

Pengembangan kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pengembangan skema sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan pemberian sertifikat pengakuan kerja yang dinaungi langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah mendapatkan lisensi dari LSP disebut dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Proses pemberian sertifikat kerja yang dilakukan oleh LSP-P1 untuk tingkat SMK dilakukan dengan Uji Kompetensi untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan produktif individu siswa sesuai dengan kompetensi tamatan SMK (Meirawan, 2012). SMK N 1 JAKARTA merupakan salah satu sekolah yang sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP P1). SMK N 1 JAKARTA juga merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang Teknologi dan Rekayasa yang memiliki beberapa Bidang Studi / Program Keahlian. Salah satu Program Keahlian yang ada di SMK N 1 JAKARTA adalah Teknik Konstruksi dan Properti. Dalam Program Keahlian tersebut terdapat dua Kompetensi Keahlian yaitu Desain Permodelan Ilmu Bangunan (DPIB) dan Bisnis Konstruksi dan Properti (BKP).

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada Kompetensi Keahlian BKP. Kompetensi Keahlian Bisnis Kostruksi dan Properti merupakan program keahlian baru yang disesuaikan sejalan dengan tuntutan perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja pada Spektrum Keahlian SMK sesuai Peraturan Direktural Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah (2018). Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui apakah implementasi kurikulum pada kompetensi keahlian BKP sudah sesuai dengan harapan. Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti juga merupakan satu-satunya Kompetensi Keahlian yang ada di SMK di DKI Jakarta. Berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan praktik keterampilan mengajar (PKM) di SMK N 1 Jakarta pada

program keahlian Teknik Konstruksi dan Properti, melihat dari kesinambungan antara mata pelajaran yang ada di SMK pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti memiliki keterkaitan dengan mata kuliah yang dipelajari di program studi PTB FT UNJ. Sesuai dengan KI & KD pada Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti antara lain mempelajari ilmu tentang Gambar teknik, Mekanika Teknik, Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah, Perencanaan Bisnis Konstruksi dan Properti, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dan Properti, Estimasi Biaya Konstruksi dan Properti, Pengelolaan Bisnis Konstruksi dan Properti. (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2017).

Sebagai calon tenaga terampil pada bidang industri, siswa SMK harus dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dengan kompetensi yang terdapat di SMK. khususnya pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK N 1 Jakarta. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai relevansi kompetensi dasar mata pelajaran dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) pada siswa SMK. Dengan demikian diharapkan agar dapat diketahui bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa SMK dan apakah kompetensi yang terdapat pada kurikulum SMK sudah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga terciptanya *Link and Match* antara sekolah kejuruan dengan Industri.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kurikulum yang dikembangkan pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK N 1 Jakarta ?
2. Bagaimana kompetensi dasar yang harus dimiliki pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK N 1 Jakarta ?

3. Bagaimana KKNi Level II yang terdapat pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK N 1 Jakarta ?
4. Bagaimana relevansi antara Kompetensi Dasar mata pelajaran dengan KKNi pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti pada SMK N 1 Jakarta ?
5. Bagaimana proses sertifikasi kompetensi berdasarkan KKNi Level II pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti pada SMK N 1 Jakarta ?
6. Apakah terdapat *Link and Match* antara kompetensi yang terdapat pada sekolah menengah kejuruan dengan Dunia Industri ?

1.3 BATASAN MASALAH

Untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pembelajaran pada tingkat SMK dalam hal pembuatan sertifikasi keterampilan mengacu pada KKNi Level II
2. Penelitian yang dilakukan yaitu pada Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti.
3. Guru SMK yang diteliti yaitu guru SMK N 1 Jakarta pada Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti.
4. Analisis dilakukan pada mata pelajaran paket keahlian (C3), yaitu pada mata pelajaran Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi dan Properti (PPKP) dan Estimasi Biaya Konstruksi dan Properti (EBKP).

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana relevansi pada Kompetensi Dasar mata pelajaran dengan KKNi yang terdapat pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK N 1 Jakarta?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui relevansi Kompetensi Dasar mata pelajaran dengan KKNI pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti di SMK N 1 Jakarta.

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN

1.6.1 KEGUNAAN TEORETIS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis mengenai perkembangan kurikulum yang ada di SMK khususnya pada kompetensi keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti baik menyangkut pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Diharapkan juga dapat memberikan informasi dan saran pada jurusan dalam upaya untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswa PTB agar mampu diterima di dunia kerja sesuai dengan bidang di jurusan.

1.6.2 KEGUNAAN PRAKTIS

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perguruan tinggi khususnya prodi PTB FT UNJ tentang pengembangan kurikulum yang ada di SMK.
2. Tersedianya lulusan SMK yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri.
3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kepada prodi Pendidikan Teknik Bangunan dalam pengembangan kompetensi mahasiswanya.
4. Sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh gelar sarjana dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.